

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Batulicin adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Badan Urusan Administrasi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batulicin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Batulicin. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Batulicin, 1 Juli 2020

Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Batulicin

ABDUL BASIT FIKRI, S.H., S.Ag.

NIP. 197409072001121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Badan Urusan Administrasi	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	3
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	16
B.3 Belanja Barang	16
B.4 Belanja Modal.....	17
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	18
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	18
B.4.3 Belanja Modal Lainnya	18

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	20
C.1 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	20
C.2 Piutang Bukan Pajak	20
C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak .	Error! Bookmark not defined.
C.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	Error! Bookmark not defined.
C.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	Error! Bookmark not defined.
(TGR).....	Error! Bookmark not defined.
C.6 Persediaan.....	Error! Bookmark not defined.
C.7 Tanah.....	21
C.8 Peralatan dan Mesin.....	29
C.9 Gedung dan Bangunan.....	29
C.10 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Error! Bookmark not defined.
C.11 Aset Tetap Lainnya.....	30
C.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	Error! Bookmark not defined.
C.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
C.14 Piutang Tagihan TP/TGR	31
C.15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR.....	Error! Bookmark not defined.
C.16 Aset Tak Berwujud.....	Error! Bookmark not defined.
C.17 Aset Lain–Lain	Error! Bookmark not defined.
C.18 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	Error! Bookmark not defined.
C.19 Utang kepada Pihak Ketiga	Error! Bookmark not defined.
C.20 Pendapatan Diterima di Muka.....	Error! Bookmark not defined.
C.21 Ekuitas	32
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	60
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	60
D.2 Beban Pegawai	60
D.3 Beban Persediaan	60

D.4 Beban Barang dan Jasa	61
D.5. Beban Pemeliharaan	61
D.6 Beban Perjalanan Dinas	62
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	62
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	Error! Bookmark not defined.
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	Error! Bookmark not defined.
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	202
E.1 Ekuitas Awal	202
E.2 Defisit LO.....	202
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	202
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	202
E.5 Koreksi Lain-lain	202
E.6 Transaksi Antar Entitas.....	202
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	Error! Bookmark not defined.
E.6.2 Transfer keluar	Error! Bookmark not defined.
E.7 Ekuitas Akhir	Error! Bookmark not defined.
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	Error! Bookmark not defined.
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	Error! Bookmark not defined.
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Error! Bookmark not defined.
F.3. Pengungkapan Lain-Lain	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	13
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2018 dan TA 2017	14
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2018	14
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017	15
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017.....	16
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017.....	17
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017.....	17
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan TA 2017.....	18
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017	18
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan TA 2017	19
Tabel 11. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	20
Tabel 12. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 13. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2018	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	Error! Bookmark not defined.
Tabel 15. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2018.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 16. Rincian Persediaan	20
Tabel 17. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2018	26
Tabel 18. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31
Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 20. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	60
Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	60
Tabel 22. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	61
Tabel 23. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	61
Tabel 24. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	62
Tabel 25. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	62
Tabel 26. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017.....	62
Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 28. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017	Error!
Bookmark not defined.	

Pengadilan Agama Batulicin

Jl. Dharma Praja No.45 Rt.02 Rw.01, Gunung Tinggi, Batulicin, Pd. Butun, Batu Licin,
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72271
Telp. (0518) 6070035 e-mail : pa.batulicin@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batulicin Semester I Tahun 2020 (*Audited*) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batulicin telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batulicin, Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran

ABDUL BASIT FIKRI, S.H., S.Ag.
NIP. 197409072001121004

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batulicin Semester I Tahun 2020 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara Semester I TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00 atau mencapai 0 persen.

Realisasi Belanja Negara Semester I TA 2020 adalah sebesar Rp1.376.787.101,00 atau mencapai 38 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp3.638.979.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2020.

Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.977.420.326,00, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp21.000.000,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp6.956.420.326,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp21.000.000,00 dan Rp6.956.420.326,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp1.519.307.042,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp1.519.307.042,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(44.200,00) dan Rp(1.519.351.242,00) sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp1.519.351.242,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp7.098.984.467,00 dikurangi defisit-LO sebesar Rp1.519.351.242,00, kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 1.376.787.101,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp6.956.420.326,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA BATULICIN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2020 DAN TA 2019

URAIAN	CATATAN	TA 2020			TA 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan		-	-	-	-	-	-
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	2.772.232.000,00	953.331.163,00	34,39	2.882.850.000,00	1.049.181.041,00	36,39
2. Belanja Barang	B.3	841.747.000,00	398.455.938,00	47,34	619.692.000,00	211.967.092,00	34,21
3. Belanja Modal	B.4	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	52.000.000,00	-	-
Jumlah Belanja		3.638.979.000,00	1.376.787.101,00	37,83	3.554.542.000,00	1.261.148.133,00	35,48

NERACA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN
NERACA
PER 30 JUNI 2020 DAN 2019

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 Juni 2020	30 Juni 2019
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1	21.000.000,00	-
Persediaan	C. 2	-	-
Jumlah Aset Lancar		21.000.000,00	-
Aset Tetap			
Tanah	C. 3	1.786.271.000,00	1.786.271.000,00
Peralatan dan Mesin	C. 4	1.713.574.107,00	1.688.574.107,00
Gedung dan Bangunan	C. 5	5.098.073.000,00	5.098.073.000,00
Jalan. Irigasi dan Jaringan	C. 6	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 7	910.000,00	910.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 8	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 9	(1.642.407.781,00)	(1.474.843.640,00)
Jumlah Aset Tetap		6.956.420.326,00	7.098.984.467,00
JUMLAH ASET		6.977.420.326,00	7.098.984.467,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C. 10	21.000.000,00	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		21.000.000,00	-
JUMLAH KEWAJIBAN		21.000.000,00	-
EKUITAS			
Ekuitas	C. 11	6.956.420.326,00	7.098.984.467,00
JUMLAH EKUITAS		6.956.420.326,00	7.098.984.467,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		6.977.420.326,00	7.098.984.467,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA BATULICIN LAPORAN OPERASIONAL TA 2020 DAN TA 2019

URAIAN	CATATAN	TA 2020	TA 2019
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		-	-
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	-	-
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	953.331.163	1.049.181.041
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	7.180.200	5.630.800
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	271.716.283	132.074.458
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	97.237.255	45.653.300
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	22.278.000	20.401.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	167.564.141	171.100.241
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	-
JUMLAH BEBAN		1.519.307.042	1.424.040.840
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.519.307.042)	(1.424.040.840)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		500	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		44.700	31.000
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(44.200)	(31.000)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	(44.200)	(31.000)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(1.519.351.242)	(1.424.071.840)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA BATULICIN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 30 JUNI 2020 DAN 2019

URAIAN	CATATAN	2020	2019
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	7.098.984.467,00	6.995.165.628
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(1.519.351.242,00)	(1.424.071.840)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3		-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	-
Koreksi lain-lain	E. 5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	1.376.787.101,00	1.261.148.133
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(142.564.141,00)	(162.923.707)
EKUITAS AKHIR	E. 7	6.956.420.326,00	6.832.241.921

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

*Profil dan
Kebijakan
Teknis Badan
Urusan
Administrasi*

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Batulicin

Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin

Rencana Strategis Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2015-2019 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Batulicin

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Agama Batulicin menetapkan visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA BATULICIN YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Agama Batulicin:

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Batulicin yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Batulicin sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Batulicin;
2. Meningkatkan proses administrasi dan penyelesaian perkara;
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Agama Batulicin;

4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan masalah hukum di Pengadilan Agama Batulicin.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Batulicin. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Agama Batulicin menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Batulicin dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Batulicin. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batulicin adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Batulicin adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2.	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya

telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/d dijadwalkan akan

diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

Akuntansi

atas

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Batulicin telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal tetapi tidak merubah pagu anggaran total. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Uraian	Tahun 2020	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.772.232.000	2.772.232.000
Belanja Barang	841.747.000	841.747.000
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000
Jumlah Belanja	3.638.979.000	3.638.979.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp0,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00.

Realisasi
Pendapatan
Rp0,00

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama Batulicin adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2020		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	0,00
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	0,00
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	0,00
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	-	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	-	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	-	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		-	-	0,00
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		-	-	0,00

Tidak terdapat transaksi pendapatan pada DIPA 01 Pengadilan Agama Batulicin tahun 2020.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan TA 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBP TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2020	TA 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-	-
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	-	-	-
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	-	-	-
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		-	-	-	-

Belanja

Realisasi
Belanja
Negara
Rp1.376.787.101,0
0

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Batulicin pada periode 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp1.376.787.101,00 atau 38% dari anggaran belanja sebesar Rp3.638.979.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2020 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2020

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	2.772.232.000,00	953.331.163,00	34,39
52	Belanja Barang	841.747.000,00	398.455.938,00	47,34
53	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Jumlah Belanja Bruto		3.638.979.000,00	1.376.787.101,00	37,83
Pengembalian Belanja		-	-	0,00
Jumlah Belanja Netto		3.638.979.000,00	1.376.787.101,00	37,83

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp115.638.968,00 atau sebesar 9,17% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2019. Hal ini disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru (Remunerasi THR, mutasi, dll) dan penambahan atas kegiatan yang disesuaikan dengan kebijakan tersebut.

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	953.331.163,00	1.049.181.041,00	(95.849.878,00)	(9,14)
52	Belanja Barang	398.455.938,00	211.967.092,00	186.488.846,00	87,98
53	Belanja Modal	25.000.000,00	-	25.000.000,00	#DIV/0!
Jumlah Belanja Netto		1.376.787.101,00	1.261.148.133,00	115.638.968,00	9,17

Belanja
Pegawai
Rp953.331.163,00

B.2 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 953.331.163,00 dan Rp 1.049.181.041,00. Realisasi Belanja Pegawai mengalami penurunan sebesar Rp 95.849.878,00 atau 9,14% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2019. Hal ini disebabkan kebijakan baru atas Remunerasi THR, serta mutasi dan kenaikan jabatan/pangkat pegawai.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	378.907.700,00	433.537.980,00	(54.630.280,00)	(12,60)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	6.043,00	7.771,00	(1.728,00)	(22,24)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	30.231.110,00	38.318.908,00	(8.087.798,00)	(21,11)
Belanja Tunj. Anak PNS	10.323.486,00	13.032.110,00	(2.708.624,00)	(20,78)
Belanja Tunj. Struktural PNS	13.090.000,00	12.600.000,00	490.000,00	3,89
Belanja Tunj. Fungsional PNS	368.425.000,00	387.570.000,00	(19.145.000,00)	(4,94)
Belanja Tunj. PPh PNS	40.257.628,00	44.698.336,00	(4.440.708,00)	(9,93)
Belanja Tunj. Beras PNS	21.436.320,00	26.505.720,00	(5.069.400,00)	(19,13)
Belanja Uang Makan PNS	55.609.000,00	55.166.000,00	443.000,00	0,80
Belanja Tunjangan Umum PNS	2.035.000,00	1.295.000,00	740.000,00	57,14
Belanja Uang Lembur	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	33.750.000,00	36.450.000,00	(2.700.000,00)	(7,41)
Realisasi Belanja Bruto	954.071.287,00	1.049.181.825,00	(95.110.538,00)	(9,07)
Pengembalian	(740.124,00)	(784,00)	(739.340,00)	94.303,57
Realisasi Belanja Netto	953.331.163,00	1.049.181.041,00	(95.849.878,00)	(9,14)

Belanja
Barang Rp
398.455.938,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 398.455.938,00 dan Rp 211.967.092,00. Realisasi Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp 186.488.846,00 atau 87,98% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2019. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian kegiatan dengan kebijakan baru.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	218.052.734,00	111.809.400,00	106.243.334,00	95,02
Belanja Barang Non Operasional	-	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	9.624.850,00	7.618.600,00	2.006.250,00	26,33
Belanja Jasa	53.663.549,00	28.441.592,00	25.221.957,00	88,68
Belanja Pemeliharaan	94.836.805,00	43.696.500,00	51.140.305,00	117,04
Belanja Perjalanan Dinas	22.278.000,00	20.401.000,00	1.877.000,00	9,20
Realisasi Belanja Bruto	398.455.938,00	211.967.092,00	186.488.846,00	87,98
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	398.455.938,00	211.967.092,00	186.488.846,00	87,98

Belanja
Modal
Rp25.000.000,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp25.000.000,00 atau 100% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2019. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian kegiatan dengan kebijakan baru.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp55.539.084.745,00 dan Rp6.003.911.426,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar Rp49.535.173.319,00 atau 825,05% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2017.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,998,958,445.00	5,993,231,426.00	49,005,727,019.00	817.68
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	-	10,680,000.00	(10,680,000.00)	(100.00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	540,126,300.00	-	540,126,300.00	100.00
Realisasi Belanja Bruto	55,539,084,745.00	6,003,911,426.00	49,535,173,319.00	825.05
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	55,539,084,745.00	6,003,911,426.00	49,535,173,319.00	825.05

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp33.864.551.059,00 dan Rp11.639.602.500,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp22.224.948.559,00 atau 190,94% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2017.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,354,003,500.00	11,639,602,500.00	(6,285,599,000.00)	(54.00)
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	28,510,547,559.00	-	28,510,547,559.00	100.00
Realisasi Belanja Bruto	33,864,551,059.00	11,639,602,500.00	22,224,948,559.00	190.94
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	33,864,551,059.00	11,639,602,500.00	22,224,948,559.00	190.94

B.4.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2019.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2020 dan TA 2019

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2020	TA 2019	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp21.000.000,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing adalah sebesar Rp21.000.000,00 dan Rp0,00, terjadi kenaikan sebesar Rp21.000.000,00 atau 0% . Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 11. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam rupiah)

No	Jenis	30 Juni 2020	30 Juni 2019
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	21.000.000	-
JUMLAH		21.000.000,00	-

C.2 Persediaan

Persediaan Rp0,00

Nilai Persediaan per tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2020	Mutasi	30 Juni 2019
1	Barang Konsumsi	-	-	-
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor: W15-A13/784.a/OT.01.2/6/2020 tanggal 30 Juni 2020. Jumlah persediaan yang rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp0,00 dan tidak disajikan dalam Neraca Persediaan.

Tanah

Rp1.786.271.000,0
0

C.3 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Batulicin per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.786.271.000,00 dan Rp1.786.271.000,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 13. Nilai Aset Tanah

(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2020	1.786.271.000,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2019	1.786.271.000,00

Tabel 14. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2020

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Nomor 17.12.01.04.05004, tanggal 7 Februari 2013	Jl. Dharma Praja, RT 03, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kab. Tanah Bumbu.	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	3.501	1.487.500.000,00
Jumlah Halaman I					3.501	1.487.500.000,00

Peralatan dan
Mesin
Rp1.713.574.107,00

C.4 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah Rp 1.713.574.107,00 dan Rp 1.688.574.107,00, terjadi kenaikan sebesar Rp25.000.000,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 15. Rincian Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2020

(dalam rupiah)

Saldo per 30 Juni 2020	494.563.621.172
Pembelian	42.227.392.070
Pengembangan Nilai Aset	412.184.265
Pengembangan Melalui KDP	95.000.000
Reklasifikasi Masuk	16.810.747.314
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	12.123.353.660
Transfer Masuk	419.100.000
Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi	490.619.381
Jumlah Mutasi Tambah	72.578.396.690
Transfer Keluar	7.700.171.896
Reklasifikasi Keluar	14.818.269.090
Normalisasi BMN	490.619.381
Jumlah Mutasi Kurang	23.009.060.367
Jumlah Mutasi	49.569.336.323
Saldo per 31 Desember 2018	544.132.957.495
Akumulasi Penyusutan	(420.519.981.572)
Nilai Buku	123.612.975.923

Mutasi tambah yang terjadi pada Badan Urusan Administrasi antara lain :

1. Pembelian

- a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 2 unit komputer All in One pada kantor Pengadilan Agama Batulicin berdasarkan SP2D No. 200811304000548 menambah peralatan dan mesin senilai Rp 25.000.000,00;

Gedung dan
Bangunan
Rp740.655.958.235,00

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp5.098.073.000,00 dan Rp5.098.073.000,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2020

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2017	737,873,634,732
Pengembangan	5,011,305,785
Pengembangan Melalui KDP	23,834,000,590
Reklasifikasi Masuk	411,069,410,807
Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi	159,902,184,000
Jumlah Mutasi Tambah	599,816,901,182
Transfer Keluar	420,046,322,560
Reklasifikasi Keluar	17,086,071,119
Normalisasi BMN	159,902,184,000
Jumlah Mutasi Kurang	597,034,577,679
Jumlah Mutasi	2,782,323,503
Saldo per 31 Desember 2018	740,655,958,235
Akumulasi Penyusutan	(100,618,321,680)
Nilai Buku	640,037,636,555

Aset Tetap

Lainnya

Rp37.975.521.

687,00

C.6 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp910.000,00 dan Rp910.000,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Aset Tetap Lainnya Per 30 Juni 2020

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2017	34,339,608,564
Pembelian	494,567,700.00
Pengembangan Nilai Aset	89,287,000.00
Pengembangan Melalui KDP	97,500,000.00
Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	2,745,479,000.00
Reklasifikasi Masuk	703,647,123.00
Jumlah Mutasi Tambah	4,130,480,823
Transfer Keluar	494,567,700.00
Jumlah Mutasi Kurang	494,567,700
Jumlah Mutasi	3,635,913,123
Saldo per 31 Desember 2018	37,975,521,687
Akumulasi Penyusutan	(99,264,000)
Nilai Buku	37,876,257,687

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp1.642.407.78
1,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp 1.642.407.781,00 dan Rp 1.474.843.640,00, terjadi kenaikan sebesar Rp 167.564.141,00 atau 11,36%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 12. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	544,132,957,495	(420,519,981,572)	123,612,975,923
2	Gedung dan Bangunan	740,655,958,235	(100,618,321,680)	640,037,636,555
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	136,058,935,444	(49,935,912,455)	86,123,022,989
4	Aset Tetap Lainnya	37,975,521,687	(99,264,000)	37,876,257,687
Jumlah		1,458,823,372,861	(571,173,479,707)	887,649,893,154

Uang Muka dari
KPPN
Rp21.000.000,0
0

C.8 Uang Muka dari KPPN

Nilai Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 adalah Rp.21.000.000,00, sedangkan Nilai Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 Rp.0,- (nihil).

Perbandingan besarnya Nilai Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 139. Rincian Uang Muka dari KPPN*(dalam rupiah)*

30 Juni 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / (Penurunan)
21.000.000,00	0	0

C.9 Ekuitas

Ekuitas Rp
6.956.420.326,0
0

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.956.420,00 dan Rp 7.098.984.467,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp0,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 14. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

30 Juni 2020	30 Juni 2019	Kenaikan / (Penurunan)
0	0	0

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp953.331.163,00

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 953.331.163,00 dan Rp 1.049.181.041,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 15. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	378.907.700,00	433.537.980,00	(12,60)
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	5.919,00	6.987,00	(15,29)
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	30.231.110,00	38.318.908,00	(21,11)
4	Beban Tunj. Anak PNS	10.323.486,00	13.032.110,00	(20,78)
5	Beban Tunj. Struktural PNS	13.090.000,00	12.600.000,00	3,89
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	368.425.000,00	387.570.000,00	(4,94)
7	Beban Tunj. PPh PNS	40.257.628,00	44.698.336,00	(9,93)
8	Beban Tunj. Beras PNS	21.436.320,00	26.505.720,00	(19,13)
9	Beban Uang Makan PNS	55.609.000,00	55.166.000,00	0,80
10	Beban Tunjangan Umum PNS	1.295.000,00	1.295.000,00	-
11	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	33.750.000,00	36.450.000,00	(7,41)
	Total	953.331.163,00	1.049.181.041,00	(9,14)

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp9.624.850,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9.624.850,00 dan Rp7.618.600,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 16. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	9.624.850,00	7.618.600,00	26,33
Total		9.624.850,00	7.618.600,00	26,33

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp271.716.283,00

Beban Barang dan Jasa pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp271.716.283,00 dan Rp140.250.992,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester I Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	185.058.394,00	91.260.400,00	102,78
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	539.500,00	1.000.000,00	(46,05)
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	19.000.000,00	18.500.000,00	2,70
4	Beban Barang Operasional Lainnya	13.454.840,00	1.049.000,00	1.182,63
5	Beban Langganan Listrik	38.722.698,00	27.006.956,00	43,38
6	Beban Langganan Telepon	1.170.851,00	1.434.636,00	(18,39)
7	Beban Sewa	13.770.000,00	0,00	#DIV/0!
Total		271.716.283,00	140.250.992,00	93,74

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp94.836.805,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp94.836.805,00 dan Rp43.696.500,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke

dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Beban Pemeliharaan 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	72.831.397,00	17.308.500,00	320,78
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.005.408,00	26.388.000,00	(16,61)
Total		94.836.805,00	43.696.500,00	117,04

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas
Rp22.278.000,00

Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp22.278.000,00 dan Rp20.401.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	22.278.000,00	20.401.000,00	9,20
Total		22.278.000,00	20.401.000,00	9,20

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp167.564.141,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 adalah masing-masing sebesar Rp167.564.141,00 dan Rp171.100.241,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	46.806.310.973,00	45.218.605.041,00	3,51
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.887.378.180,00	16.723.673.918,00	0,98
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	5.055.148.223,00	4.314.329.057,00	17,17
Jumlah Penyusutan		68.748.837.376,00	66.256.608.016,00	3,76
1	Beban Amortisasi Software	759.147.862,00	702.561.620,00	8,05
2	Beban Amortisasi Lisensi	132.038.582,00	122.093.481,00	8,15
Jumlah Amortisasi		891.186.444,00	824.655.101,00	8,07
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	81.461.419,00	81.461.419,00	-
Total		69.721.485.239,00	67.162.724.536,00	3,81

0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**E.1 Ekuitas Awal**

Ekuitas Awal
Rp7.098.984.467,
00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.098.984.467,00 dan Rp6.995.165.628,00.

E.2 Defisit LO

Defisit LO
Rp.1.519.351.242
,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah defisit sebesar Rp.1.519.351.242,00 dan Rp1.424.071.840,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00.

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
(Rp.0,00)

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp0,00.

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Koreksi ini merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah dibuat per 31 Desember 2019 ditambah dengan koreksi atas penyajian akrual tahun 2019.

E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.376.787.101,00 dan Rp1.261.148.133,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.